

BAB VI

PENUTUP

Pada bab sebelumnya telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang tingkat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata serta pertumbuhan dan perkembangannya dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2010-2014. Dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian tersebut.

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2010-2014 masih relatif kecil. Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi PAD, hasil rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 4.27%. Kecilnya rata-rata kontribusi PAD ini disebabkan karena sumber-sumber PAD belum memberikan kontribusi yang maksimal, yakni kontribusi yang diberikan dari sektor pajak daerah sebesar 14.29%, sektor retribusi daerah sebesar 40.13%, sektor Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 14.08%, sektor Lain-lain PAD yang Sah sebesar 31,50%. Dari keempat sektor tersebut

yang memberikan kontribusi terhadap total penerimaan PAD yang paling kecil adalah pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah.

2. Sementara itu untuk tingkat pertumbuhan pendapatan daerah pun masih mengalami fluktuasi, yakni tahun 2011 meningkat sebesar 19.01%, tahun 2012 menurun sebesar 9.26%, tahun 2013 meningkat sebesar 9.53%, dan tahun 2014 kembali meningkat sebesar 14.80%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Lembata belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya sehingga menyebabkan tingkat pertumbuhan pendapatan daerahnya relatif rendah yakni sebesar 13,25%. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Lembata dalam meningkatkan pelaksanaan otonomi daerahnya berjalan lambat
3. Rendahnya kontribusi yang diberikan PAD terhadap Pendapatan Daerah Kab.Lembata disebabkan karena potensi sumber PAD yang sangat terbatas dimana tidak semua jenis penerimaan dipungut oleh daerah, Sektor-sektor yang menjadi sumber pendukung Pendapatan Daerah belum bergerak secara maksimal dalam memberi kontribusi bagi upaya peningkatan pendapatan daerah (contoh: Sektor Pariwisata yang belum berkembang dengan baik, Investasi daerah masih berjalan lambat), serta Upaya intensifikasi belum berjalan dengan maksimal karena mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih lemah.

6.2 SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Lembata antara lain :

1. Pemerintah Daerah hendaknya berusaha mengoptimalkan penggalian dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang ada didaerahnya masing-masing, dalam rangka mewujudkan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Misalkan dengan memperbaiki jalan-jalan yang merupakan sektor utama penyalur poternsi PAD sehingga bisa memperlancar peningkatan pendapatannya. Selain itu juga
2. Pemerintah Daerah hendaknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara lebih baik. Misalkan dengan cara memberikan kesempatan kepada staf/pegawai untuk menjalankan pendidikan lebih lanjut atau mengikuti berbagai kursus yang berhubungan dengan bidang masing-masingnya.
3. Pemerintah Daerah hendaknya mempunyai perencanaan yang baik dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah agar dapat memperoleh hasil yang optimal dan akan berimbas pada perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi. 2011. *Analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan analisis kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, Analisis kontribusi komponen-komponen PAD terhadap PAD, dan Analisis tingkat Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2005-2008*
- Bappenas. 2003. *Peta Kemampuan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. Tinjauan Atas Kinerja PAD, dan Upaya yang dilakukan Daerah: Direktorat Pembangunan Otonomi Daerah.*
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Handoko P, Sri. 2013. *Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah sebagai sumber PAD*. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>
- Harlan Evan Kaporu. 2011. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*
- M.Suparmoko.2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Lapoaran Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPPYKPN Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
- Saragi J.P. 2004. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Gahlia Indonesia
- Setyawan, Dharma. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan
-Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
-Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
-Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Bandung: Citra Umbara 2011 edisi Revisi.
-Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 Tentang *Pemerintah Daerah*
-Peraturan Menteri dalam Negeri N0.13 tahun 2006 tentang *Pendapatan Daerah*